

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, adalah dampak nyata dari otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, otonomi daerah sendiri memiliki tujuan dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Kembali ke PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah diantaranya :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Lain-Lain PAD Yang Sah.

Salah satu pendapatan asli daerah bersumber dari retribusi daerah salah satunya adalah retribusi parkir yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru. Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran, khususnya untuk kendaraan roda empat. Masalah perparkiran tersebut akhir-akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan. Dalam usaha menangani masalah tersebut, maka diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup, dan penentuan bentuk permodelan parkir yang tepat pada lahan parkir yang ada, dimana kebutuhan akan lahan parkir (*demand*) dan prasarana yang dibutuhkan (*supply*) haruslah seimbang dan disesuaikan dengan karakteristik perparkiran.

Secara umum parkir dibagi menjadi 2 jenis yaitu : parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Dimana parkir di badan jalan merupakan masalah utama yang menyebabkan kemacetan, karena sudah pasti mengurangi kapasitas ruas jalan yang bersangkutan. Selain parkir di badan jalan, masih ada parkir di luar badan jalan yang juga harus diperhatikan, baik pengaturan parkir maupun penentuan bentuk Satuan Ruang Parkir (SRP) yang tepat.

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2010, pemerintah Kota Bandung membuat terobosan melalui mesin parkir otomatis (*e-parking*). Sebanyak 445 mesin disebar di seluruh penjuru Kota Bandung, mesin yang diharapkan memecahkan masalah perparkiran di Kota Bandung akhir-akhir ini dalam

pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan pemerintah. Mesin ini bahkan tidak tersentuh oleh pengguna parkir, bahkan oleh petugas parkirnya sekalipun, ketidaktahuan melatarbelakangi masyarakat pengguna parkir di badan jalan untuk tidak menggunakan mesin tersebut, meskipun beberapa diantaranya menggunakan mesin tersebut dengan seksama, selain pemerintah Kota Bandung, mesin parkir ini juga menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, bagian yang secara spesifik mengurus mesin parkir tersebut adalah bagian parkir yang dikenal dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dinas Perhubungan bersama pemerintah Kota Bandung sendiri dirasa belum melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal, pengawasan sendiri adalah salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan guna menjamin berjalannya suatu aturan dan kebijakan yang dibuat, namun dalam pelaksanaannya pengawasan terhadap mesin parkir ini sendiri belum dilaksanakan, selanjutnya mesin parkir otomatis ini sendiri belum dirasa implementatif, penerapannya dengan menggunakan aturan lama dan belum memiliki peraturan tersendiri yang membuat mesin parkir otomatis menjadi sesuatu yang kurang kuat keberadaanya.

Mencontoh permodelan perparkiran di luar negeri, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, pemerintah Kota Bandung bahkan harus menggelontorkan dana hingga 80 miliar rupiah untuk membeli mesin parkir sebanyak 445 buah demi tata kelola perparkiran yang lebih baik, khususnya untuk perparkiran di sisi badan jalan. Disebar di 57 ruas jalan namun belum

berdampak baik bagi perparkiran di Kota Bandung. Berikut tabel persebaran mesin parkir otomatis yang tersedia di Kota Bandung :

Tabel 1.1

Lokasi dan Jumlah Mesin Parkir Otomatis di Kota Bandung Pada Tahun 2018

Lokasi	Jumlah	Lokasi	Jumlah
Jalan Leuwi Panjang	9	Jalan Baranangsiang	5
Jalan Astana Anyar	9	Jalan Kemuning	4
Jalan Panjagalan	5	Jalan Cihapit	5
Jalan Pagarsih	9	Jalan Taman Pramuka	7
Jalan Kalipah Apo	6	Jalan Cilaki	16
Jalan Cibadak	9	Jalan Hasanuddin	6
Jalan Dalem Kaum	8	Jalan Surya kencana	5
Jalan Jendral Sudirman	22	Jalan Imam Bonjol	4
Jalan Gardu Jati	5	Jalan Tengku Umar	5
Jalan Jamika	24	Jalan Japati	5
Jalan Dewi Sartika	4	Jalan Cisangkuy	11
Jalan Alkateri	4	Jalan Cimanuk	3
Jalan Gg.Suniaraja	4	Jalan Ciliwung	8
Jalan Sunia Raja	5	Jalan Progo	7
Jalan Rangga Gading	5	Jalan Ambon	7
Jalan Taman Sari	6	Jalan M.Toha	14
Jalan Badak Singa	1	Jalan Lengkong Kecil	17
Jalan Cihampelas	7	Jalan Lengkong Besar	10
Jalan Pajajaran	15	Jalan Karapitan	9
Jalan Sultan Agung	6	Jalan Burangrang	9
Jalan Trunojoyo	5	Jalan Halimun	6
Jalan Bahureksa	4	Jalan Malabar	4
Jalan Sumatra	7	Jalan Talaga Bodas	4
Jalan Lembong	2	Jalan Lodaya	7
Jalan Naripan	2	Jalan Palasari	6
Jalan Jawa	3	Jalan Gatot Subroto	4
Jalan Vandefenter	5	Jalan Achmad Yani	34
Jalan Otista	17	Jalan Cianjur	5
Jalan Kebon Jati	10	TOTAL	445

Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2019

Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi pendapatan asli daerah Kota Bandung bisa sangat besar dari retribusi parkir. Kebijakan retribusi di bidang pelayanan parkir yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 4 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Namun pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir beberapa tahun kebelakang masih dirasa kurang maksimal.

Tabel 1.2
Target dan Capaian Retribusi Parkir di Kota Bandung Tahun 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Peningkatan Target	Capaian (Rp)	Capaian/Target	Peningkatan
2016	9.000.000.000	-	4.800.000.000	53%	-
2017	140.000.000.000	1.555,55%	5.600.000.000	4%	16%
2018	118.000.000.000	-15,71%	6.000.000.000 (s/d Agustus)	5%	7%

Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2018

Dari tabel 1.2 diatas pada tahun 2016 sebelum mesin parkir otomatis di pergunakan di Kota Bandung capaian target yang didapatkan sebesar 53% meski belum dikatakan baik namun hampir dari setengah dari target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung dapat terpenuhi, selanjutnya kenaikan secara signifikan di kolom target pada tahun 2017 yang semula hanya 9 milyar Rupiah naik ke angka 140 milyar Rupiah itu dikarenakan pada tahun tersebut mesin parkir otomatis di Kota Bandung sudah diaplikasikan, meski ada kenaikan di segi capaian dari tahun sebelumnya, namun ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, begitupun dengan yang terjadi pada tahun 2018 hingga bulan agustus.

Tata kelola parkir yang buruk membuat Kota Bandung dapat dikatakan merugi dari sektor retribusi parkir, berdasarkan hasil observasi awal ditemukan beberapa indikasi belum optimalnya pendapatan asli daerah dari retribusi parkir diantaranya :

1. Belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pengawasan, kurangnya inspeksi secara langsung oleh pemerintah Kota Bandung.
2. Kurangnya data dan laporan yang diberikan petugas di lapangan terhadap pemerintah Kota Bandung yang membuat fungsi pengawasan tidak berjalan secara maksimal.
3. Kurangnya edukasi dari pemerintah terhadap masyarakat tentang penggunaan mesin parkir otomatis tersebut serta belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengguna parkir dan petugas parkirnya sendiri.
4. Belum optimalnya pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang diberikan oleh petugas dilapangan oleh pemerintah yang berakibat pada terbengkalainya fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
5. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi salah satu alasan mengapa pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah belum maksimal.
6. Terdapat mesin parkir otomatis dalam keadaan rusak yang belum mendapatkan perbaikan, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung belum dilaksanakan secara menyeluruh.

7. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan petugas di lapangan yang sebetulnya dapat membantu tugas pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
8. Kurang terjaminnya kesejahteraan petugas parkir di tepi jalan oleh pemerintah, sehingga hal ini digunakan alasan oleh oknum-oknum petugas parkir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba mengkaji dan melakukan pendekatan melalui teori pengawasan, karena pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengoptimalkan retribusi mesin parkir otomatis di Kota Bandung agar pendapatan asli daerah Kota Bandung dari sektor mesin parkir otomatis sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan selanjutnya peneliti menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Pengawasan Mesin Parkir Otomatis (Studi Tentang Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Bandung)”**

1.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap Pengawasan Mesin Parkir Otomatis (Studi Tentang Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Bandung)

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada topik yang dipilih, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Mesin Parkir Otomatis di Kota Bandung
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan Mesin Parkir Otomatis di Kota Bandung
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam Pengawasan Mesin Parkir Otomatis di Kota Bandung

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan laporan tugas akhir ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana Pengawasan Mesin Parkir Otomatis di Kota Bandung. Sementara tujuan dari penelitian ini di adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Mesin Parkir Otomatis di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam Pengawasan Mesin Parkir Otomatis di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam Pengawasan Mesin Parkir Otomatis di Kota Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya dalam kajian kebijakan publik. Juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan informasi tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis :

Laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait dengan Pengawasan Mesin Parkir Otomatis (Studi Tentang Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Bandung). Kemudian bagi masyarakat umum yaitu hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebagai tambahan pengetahuan dan dapat dikaji lebih lanjut dan juga salah satu bentuk sosialisasi mengenai mesin parkir otomatis.